

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar, karena kemiskinan menyangkut pemenuhan kebutuhan yang paling mendasar dalam kehidupan dan kemiskinan merupakan masalah global karena kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi banyak negara (Yacoub 2012). Pemerintah cukup serius dalam menanggapi isu kemiskinan yang tertuang dalam kerangka *Sustainable Develolpment Goals* (SDGs). Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005- 2025 terlihat jelas bahwa pemerintah Indonesia mulai memasukkan beberapa program terkait dengan kemiskinan sesuai dengan kerangka SDGs. *Sustainable Develolpment Goals* (SDGs) merupakan sebuah kesepakatan global yang bertujuan untuk melaksanakan pembangunan dengan skala global. Didalam tujuannya penghapusan kemiskinan menjadi tujuan pertama. Dari tujuan tersebut juga dapat dilihat bahwa negara didunia sepakat bahwa kemiskinan harus dihapuskan.

Pengentasan kemiskinan memiliki keterkaitan dengan tujuan lain yang dicanangkan oleh SDGs. Tujuan selanjutnya seperti dunia tanpa kelaparan, kesehatan, kesejahteraan, pendidikan serta tujuan yang lain akan dapat terselesaikan apabila kemiskinan dapat ditekan atau setidaknya dikurangi. Berbicara mengenai kemiskinan tentu masalah tersebut juga menjadi masalah klasik yang masih dihadapi Indonesia dan masih berusaha dihadapi oleh Pemerintah Indonesia. Pengentasan kemiskinan sudah dimulai sejak rezim orde baru, namun masih

menyisakan persoalan hingga saat ini meskipun pemerintahan telah mengalami beberapa kali pergantian. Beberapa program telah diupayakan pemerintah pada masa itu diantaranya program Inpres Desa Tertinggal, Tabungan Keluarga Sejahtera dan juga Kredit Usaha Rakyat. Beberapa program yang dicanangkan ataupun sudah dijalankan oleh pemerintah pada masa itu belum mampu menekan masalah kemiskinan secara signifikan (Pratama *et al.*, 2020).

Salah satu upaya menurunkan kemiskinan adalah pembangunan ekonomi yang dicerminkan oleh indikator pertumbuhan ekonomi. Penurunan kemiskinan ini dicapai melalui pertumbuhan ekonomi dan redistribusi pendapatan. Pengurangan kemiskinan ditentukan besarnya kapasitas yang diiringi pemerataan setiap golongan pendapatan utamanya penduduk miskin. Pertumbuhan ekonomi dipastikan di wilayah kantong-kantong kemiskinan. Di sisi lain kemiskinan disebabkan rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) yang berdampak pada rendahnya aksesibilitas pada hal-hal yang menunjang kehidupan yang layak. Dengan aksesibilitas yang terbatas berakibat turunnya produktivitas dan diikuti rendahnya pendapatan Rendahnya pendapatan inilah yang menjadi awal mula kemiskinan. Peran pemerintah baik pusat maupun daerah dalam mengejar pertumbuhan ekonomi harus diiringi upaya intensif pemerataan distribusi pendapatan serta pembangunan manusia. Pembangunan harus berdimensi spasial tidak hanya sektoral serta lokasi geografis aktivitas ekonomi (Fitri *et al.*, 2021).

Sepanjang 2010 hingga 2017 tingkat kemiskinan Indonesia cenderung menurun namun masih di atas 10 persen. Memasuki tahun 2018 hingga 2020 persentase kemiskinan memasuki era di bawah 10 persen. Pandemi Covid-19

berdampak pada peningkatan cukup signifikan pada tahun 2020 dan 2021 dengan persentase masing-masing sebesar 9,78 persen dan 10,14 persen. Berbagai kebijakan terkait kemiskinan di masa Covid-19 telah terlihat di tahun 2022 dengan persentase mencapai 9,54 persen. Namun demikian capaian ini masih jauh dari target RPJMN 2020-2024 yang sebesar 7 hingga 6,5 persen (Endrawati *et al.*, 2023).

Menurut Badan Pusat Statistik Indonesia (2023) kemiskinan dipandang sebagai ketidak mampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Sementara Penduduk Miskin merupakan penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

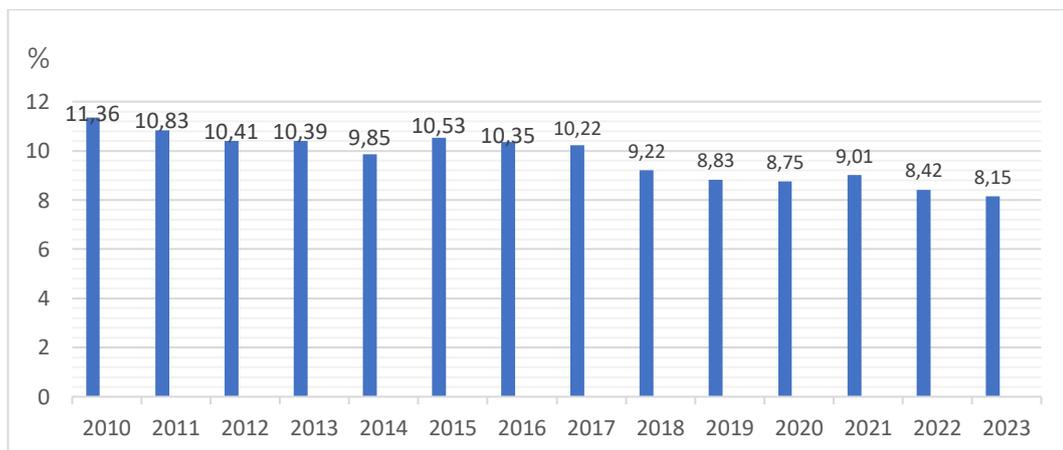
Ketidaksesuaian dalam pembangunan wilayah menunjukkan perbedaan dalam kondisi antara daerah yang berkembang pesat dan daerah yang tertinggal. Perbedaan ini terjadi karena wilayah yang terbelakang seringkali tidak memiliki sumber daya yang diperlukan dan tidak dapat memaksimalkan potensi lokalnya. Hal ini menyebabkan perbedaan antara wilayah maju dan terbelakang. Kemampuan suatu wilayah untuk mendorong proses pembangunan sangat bervariasi, berdampak. Beberapa daerah mengalami kemajuan yang signifikan dalam pembangunan, sementara yang lain tetap stagnan, pun demikian dengan fokus pembangunan yang cenderung terpusat dan kurang memperhatikan kepentingan masyarakat secara menyeluruh. Ketimpangan pembangunan antar wilayah cenderung memperkuat kemiskinan di beberapa daerah, hal ini menjadi komponen penting dalam mendorong pertumbuhan sebuah daerah yang diharapkan dapat mengatasi kemiskinan (Purnama *et al.*, 2024).

Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada tahun 2020, tingkat kemiskinan di Sumatera Utara sebesar 8,75 persen, lebih tinggi dari pada tingkat kemiskinan nasional sebesar 7,88 persen. Kompleksnya masalah kemiskinan merupakan masalah yang bersifat universal, kemiskinan berhubungan dengan banyak bagian kehidupan sehingga usaha dalam memecahkan persoalan kemiskinan menjadi sulit.

Menurut Sembiring *et al.*, (2020) Provinsi Sumatera Utara banyak dampak yang mengasumsikan berefek kuat atas masalah kemiskinan, beberapa dampak itu meliputi keadaan perekonomian yang dikalkulasi dari kemajuan perkembangan ekonomi yang semakin naik dan level kesejahteraan masyarakat yang kalkulasi dari *Human Development Index* (HDI). Kemiskinan merupakan kondisi yang melibatkan berbagai aspek karena berhubungan dengan pemasukan/pendapatan yang rendah, buta huruf, derajat kesehatan yang buruk dan ketidaksamaan gender serta menurunnya kualitas lingkungan hidup. Menangani kasus kemiskinan tidak boleh dilaksanakan secara parsial/terpisah dari masalah-masalah pengangguran, pendidikan, kesehatan dan variabel lain yang secara nyata berhubungan langsung dengan masalah kemiskinan. Kemiskinan di Sumatera Utara masih menjadi masalah yang perlu diperhatikan, dan faktor-faktor seperti tingkat partisipasi angkatan kerja, Kesetaraan dan pembangunan Gender dianggap dapat memengaruhi tingkat kemiskinan di wilayah tersebut.

Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu dari beberapa provinsi dengan tingkat kemiskinan dalam angka 8,75 persen yang lebih tinggi dari rata-rata tingkat kemiskinan nasional dalam angka 7,88 persen. Selain itu, Sumatera

Utara merupakan salah satu provinsi di Pulau Sumatera dengan jumlah penduduk terbesar jika dibandingkan dengan provinsi lainnya. Keberhasilan provinsi Sumatera Utara dalam menanggulangi kemiskinan belum sepenuhnya berhasil. Ini terlihat dari tingkat kemiskinan yang masih relatif tinggi yaitu angka diatas 10 persen. Teori Maltkus dalam Skuosen (2009 : 85) menyatakan bahwa sumber daya di bumi tidak dapat memenuhi tuntutan populasi yang terus bertambah, dan karena kebutuhan manusia jauh lebih besar daripada jumlah sumber daya alam yang dapat digunakan untuk memuaskan mereka, ini akan mendorong orang untuk hidup dalam kemiskinan karena akan ada banyak persaingan untuk pemenuhan kebutuhan dasar mereka. Hal ini menunjukkan bahwa dibutuhkan strategi yang efektif untuk mengurangi angka kemiskinan di Sumatera utara yang terus meningkat (Fadriyani & Purnomo, 2022) . Berikut Persentase Penduduk Miskin Provinsi Sumatera Utara tahun 2017-2022 (Gambar 1.1) :



Sumber : *Badan Pusat Statistik 2024*

Gambar 1.1 Persentase Penduduk Miskin Sumatera Utara Tahun 2010-2023 Dalam Satuan Persen (%)

Berdasarkan gambar 1.1 dapat diketahui bahwa dari tren grafik kemiskinan di Sumatera Utara khususnya pada sepanjang tahun 2010-2023 menunjukkan

bahwa angka kemiskinan di Sumatera Utara (2010-2023) berfluktuasi, tetapi cenderung mengalami penurunan pada setiap tahunnya. Tahun 2010-2014 yang terus mengalami penurunan namun pada tahun 2015 mengalami peningkatan yang disebabkan oleh meningkatnya tingkat pengangguran dan kenaikan harga BBM (Statistik et al., 2013). Tahun 2016 - 2017 angka kemiskinan dalam angka 10,22 persen menurun hingga 8,75 persen pada tahun 2020 dikarenakan peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang mengindikasikan kinerja pembangunan yang meningkat menuju ke arah perekonomian yang lebih stabil penurunan pengangguran yang disebabkan oleh peningkatan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan.

Tingkat pendidikan masyarakat Sumatera Utara rata-rata rendah, sehingga masyarakat tidak mampu menyekolahkan anaknya, namun peningkatan PDRB dapat meningkatkan kesempatan kerja dan mengurangi pengangguran (Vendison et al., 2022), dan kembali mengalami peningkatan sebesar 9,01 persen pada tahun 2021 namun kembali menurun sampai tahun 2022 dalam angka 8,42 persen. Pandemi Covid-19 melanda Indonesia yang bermula pada tahun 2019, dan ini juga berdampak pada peningkatan kemiskinan di Sumatera Utara yang menjadi alasan pada tahun 2021 meningkatnya angka kemiskinan (I. P. S. Sembiring *et al.*, 2021). Banyaknya usaha yang mengalami kebangkrutan dan pemutusan tenaga kerja membuat masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhannya sehingga menyebabkan meningkatnya penduduk miskin (Muslim, 2020).

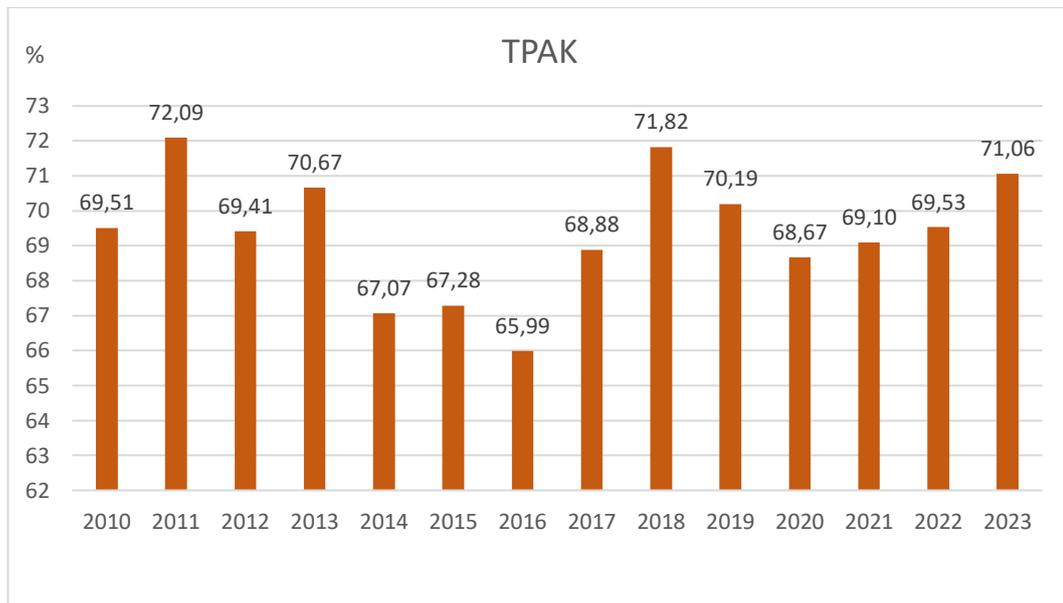
Pada tahun 2022- 2023 kemiskinan di Sumatera Utara menurun hingga 27 persen dikarenakan tingkat pengangguran yang menurun, Membaiknya kondisi

ketenagakerjaan yang juga tercermin dari peningkatan proporsi pekerja formal, dan Nilai Tukar Petani (NTP) yang secara umum semakin meningkat (Badan Pusat Statistik, 2023).

Menurut Basorudin *et al.*, (2019), Kemiskinan dapat ditinjau dari berbagai sisi, salah satunya dari ketenagakerjaan. Pada dasarnya tujuan seseorang untuk bekerja adalah untuk memperoleh penghasilan sehingga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan angka Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), sebab ketenagakerjaan dapat menjadi sumber masalah kemiskinan. Jika suatu wilayah memiliki jumlah penduduk yang berstatus tidak bekerja lebih banyak, maka akan berimplikasi pada peningkatan jumlah penduduk miskin. Ketenagakerjaan dipercaya menjadi jalan keluar terbaik dari situasi kemiskinan. Banyaknya tenaga kerja yang aktif dalam bekerja bisa meningkatkan pendapatan yang mempengaruhi meningkatkan pengeluaran konsumsi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan keluar dari kemiskinan.

Menurut Badan Pusat Statistik (2020) Persentase individu yang bekerja ataupun mencari pekerjaan di pasar tenaga kerja dikenal sebagai Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), yang memperlihatkan proporsi tenaga kerja yang tersedia untuk bekerja di berbagai industri. Distribusi penduduk yang aktif dengan ekonomi diprofilkan oleh pengelompokan angkatan kerja berdasarkan jenis kelamin serta kelompok umur. TPAK biasanya digunakan untuk menunjukkan proporsi penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang aktif dalam ekonomi disebuah negara atau kawasan serta ketersediaan tenaga kerja untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Perbandingan jumlah penduduk pada angkatan kerja dengan jumlah penduduk dalam kelompok usia kerja tersebut disebut dengan tingkat

partisipasi kerja atau angkatan kerja (Murialti & Romanda, 2020). Berikut perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Provinsi Sumatera utara.



Gambar 1.2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Sumatera Utara Tahun 2010-2023 Menurut 15 Tahun ke Atas (%)

Sumber : *Badan Pusat Statistik 2024*

Berdasarkan Gambar diatas, dapat diketahui bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Sumatera Utara pada setiap tahunnya mengalami fluktuasi. Hal tersebut dapat dilihat dari tahun 2010-2023 tingkat partisipasi angkatan kerja pada tahun 2010 sebesar 69,51 persen, meningkat pada tahun 2011 sebesar 72,09 persen yang disebabkan oleh peningkatan jumlah penduduk yang aktif bekerja, meningkatnya jumlah Penduduk Usia Kerja (PUK) dan menurunnya tingkat pengangguran. Pada tahun 2012 sebesar 69,41% menjadi 70,67 % pada tahun 2013 Kondisi kenaikan tersebut menggambarkan terjadinya peningkatan kontribusi penduduk usia 15 tahun keatas yang secara ekonomi semakin meramaikan pasar tenaga kerja di Sumatera Utara. Selain itu, jumlah penduduk yang kegiatan utamanya mengurus rumah tangga semakin berkurang dari tahun 2012 ke

tahun 2013 kemungkinan terjadi karena adanya perubahan status penduduk dari bukan angkatan kerja menjadi angkatan kerja. Kemudian pada tahun 2014 sebesar 67,07% mengalami penurunan karena keterlibatan penduduk usia kerja dalam pasar berkurang, Namun pada tahun 2015 mengalami peningkatan dan kembali menurun pada tahun 2016 yang disebabkan oleh indikator yang sama juga dipengaruhi tingkat pengangguran (BPS, 2016).

Pada tahun 2017 sebesar 68.88 persen, kemudian pada tahun 2018 meningkat sebesar 71.82 persen dimana pada tahun 2018 merupakan tahun terbaik dikarenakan tingkat partisipasi angkatan kerja tertinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan tahun berikutnya. Terjadinya peningkatan tingkatan partisipasi angkatan kerja tahun 2017-2018 disebabkan oleh peningkatan jumlah penduduk, peningkatan kualitas penduduk yang dapat meningkatkan pula pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Kualitas penduduk yang meningkat dapat meningkatkan produktivitas dan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses produksi, sehingga meningkatkan tingkat partisipasi angkatan kerja dan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang meningkatkan kesempatan kerja dan mengurangi pengangguran. Tingkat partisipasi angkatan kerja dapat meningkat jika jumlah angkatan kerja yang tersedia dapat disertai dengan kesempatan kerja.

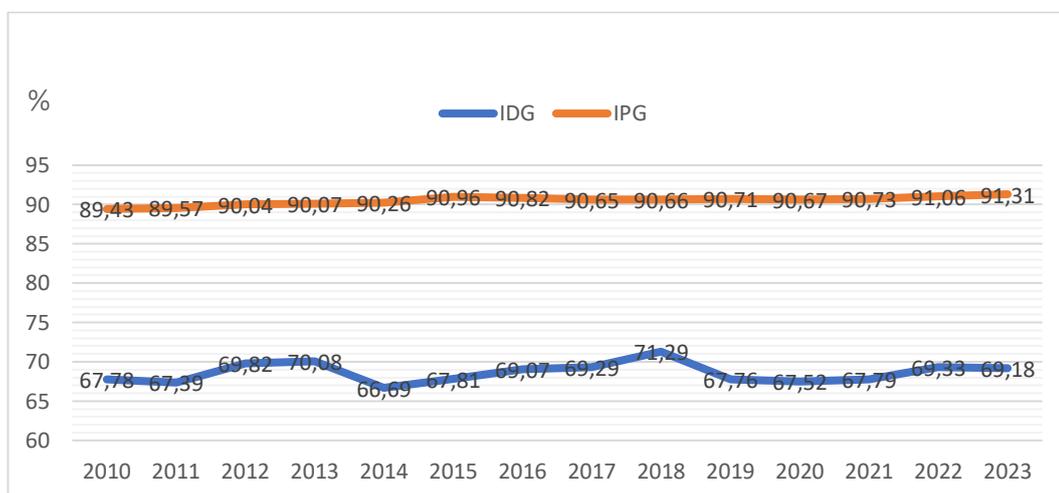
Pada tahun 2019 - 2020 tingkat partisipasi angkatan kerja mengalami penurunan yang sangat drastis sebesar 70.19 persen di tahun 2019 dan 68.67 persen di tahun 2020 (Badan Pusat Statistik, 2023). Berdasarkan fenomena yang terjadi pada tahun 2020 terjadi nya pandemi covid-19 di Indonesia berdampak terhadap berkurangnya kegiatan ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa berkurang, hal ini menyebabkan banyaknya perusahaan yang melakukan pengurangan

karyawan atau Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena ketidakmampuan perusahaan untuk memenuhi tanggungan karyawannya, sehingga berdampak pada menurunnya tingkat partisipasi angkatan kerja. Kemudian pada tahun 2021 tingkat partisipasi angkatan kerja kembali meningkat sebesar 69.10 persen hingga tahun 2022 sebesar 69,53 persen (Syafira *et al*, 2023). Pada tahun 2022-2023 terjadi peningkatan sebesar 53 persen dikarenakan jumlah angkatan dan jumlah penduduk yang bekerja di Provinsi Sumatera Utara meningkat, adanya peningkatan proporsi pekerja penuh, dan terjadinya penurunan pengangguran (Badan Pusat Statistik, 2023).

Selain itu, kemiskinan juga erat kaitannya dengan permasalahan Gender. Isu Gender dan kemiskinan rumah tangga merupakan salah satu sumber diskriminasi perempuan. Ketidaksetaraan gender dalam alokasi sumberdaya dalam rumah tangga memperlihatkan laki-laki dan perempuan mengalami bentuk kemiskinan yang berbeda (Noerdin, 2006). Selain itu, masalah gender dalam proses pembangunan juga tidak bisa diabaikan. Hal ini disebabkan status individu baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak sebagai modal manusia untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam berkontribusi terhadap pembangunan dan mendapatkan kehidupan yang layak serta pencapaian kesejahteraan yang setara (Rohaeni, 2019). Ketidaksetaraan gender mempunyai dampak yang negatif dalam berbagai aspek pembangunan dari aspek ekonomi hingga keamanan dan pertahanan negara (Aini, 2021).

Menurut Kertati (2021) Berbagai upaya kebijakan yang ditempuh tidak lain untuk mendorong pencapaian kesetaraan dan keadilan gender. Sebagaimana diketahui dalam berbagai bidang pembangunan khususnya di daerah kesenjangan gender yang masih menganga. Beberapa daerah seperti provinsi Sumatera Utara

bahkan memiliki capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang relatif rendah. IPG memiliki kriteria pembentuk yang sama dengan IPM, hanya saja IPG mempersandingkan kondisi laki-laki dan perempuan. Kementerian PPPA merumuskan IDG adalah mengukur partisipasi aktif perempuan pada kegiatan ekonomi yaitu dengan indikator persentase sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja, kegiatan politik dengan indikator keterlibatan perempuan di parlemen, serta dalam pengambilan keputusan melalui indikator perempuan sebagai tenaga manajer, professional, administrasi, teknisi. Kesimpulannya, IDG digunakan untuk melihat sejauh mana pencapaian kapabilitas perempuan dalam berbagai bidang kehidupan (Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2019).



Sumber : *Badan Pusat Statistik 2024*

Gambar 1.3 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010-2022 dalam Satuan Persen (%)

Berdasarkan Gambar di atas bahwa Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2010-2023 mengalami fluktuasi setiap tahunnya yang disebabkan oleh tingkat persentase angkatan kerja perempuan diiringi dengan peningkatan dan penurunan lapangan pekerjaan yang tidak biasa terkait gender

sehingga mampu menyerap angkatan kerja tanpa ada diskriminasi gender. Pada dimensi pemberdayaan, ketimpangan gender dilihat dari persentase keterwakilan perempuan di parlemen. Indeks Pemberdayaan Gender berpengaruh pada dimensi keterwakilan parlemen, pengambilan keputusan, serta distribusi pendapatan (Rusli & Magna, 2023).

Pada tahun 2019 terjadi penurunan dengan angka 67,76 persen dari tahun sebelumnya 2018 dengan angka 71,29 persen dan terus menurun hingga tahun 2020 dengan angka 67,52 persen yang terjadi akibat pandemi covid 19, kesetaraan gender sangat mengkhawatirkan dikarenakan munculnya rasa ketakutan dibandingkan laki-laki sehingga produktivitas dilingkungan sekitar yang berdampak negatif sehingga banyak perempuan memiliki kecenderungan lebih banyak mematuhi protokol kesehatan ketika gender dikategorikan sebagai jenis kelamin yang dikotomis. Hal ini disebabkan orientasi pada psikologi gender yang baik pada kondisi kehidupan yang tidak normal masa pandemi COVID-19 (Kurnianingsih *et al.*, 2022). Kemudian pada tahun 2020-2022 IDG Sumatera Utara meningkat karena peningkatan keterlibatan perempuan pada dimensi keterwakilan parlemen, pengambilan keputusan, serta distribusi pendapatan. Kemudian pada tahun 2023 menurun akibat penurunan indikator yang sama.

Berdasarkan Gambar diatas bahwa Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2010-2023 setiap tahunnya mengalami peningkatan yang dimulai tahun 2010-2015 yang sebabkan oleh peningkatan jumlah penduduk yang berpartisipasi dalam bidang kesehatan, ekonomi dan sosial dan juga menurunnya kesenjangan antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) laki-

laki dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perempuan. terjadinya penurunan pada tahun 2016-2018 yang disebabkan oleh penurunan indikator yang sama (Usmansyah, 2020), namun pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 90,67 persen, hal ini disebabkan pada tahun 2020 terjadinya Pandemi Covid-19 telah berdampak besar pada bidang kesehatan, ekonomi, dan sosial.

Akibat dari pandemi Covid-19 juga terlihat dari adanya penurunan drastis mata pencaharian secara umum, dan dapat mengganggu kemajuan yang telah dicapai selama ini. Perubahan keadaan ini juga mempengaruhi kesetaraan gender, sehingga perempuan lebih sulit dalam menghadapi Covid-19 dibandingkan laki-laki, baik dari segi kesehatan maupun ekonomi (Chairani, 2020). Pandemi Covid-19 memiliki implikasi ekonomi yang berlaku bagi perempuan maupun laki-laki, namun perekonomian pada perempuan lebih rentan untuk terdampak karena perempuan memiliki pendapatan dan tabungan yang rendah serta tidak memiliki proteksi yang memadai (Badan Pusat Statistik, 2020). Sejalan dengan itu, Komisi Eropa juga melaporkan bahwa pandemi Covid-19 berdampak terhadap kesetaraan gender, baik dari sisi partisipasi perempuan dalam pasar tenaga kerja maupun kesetaraan dalam pengambilan keputusan pada bidang ekonomi dan politik (Salsabila & Yunus Hendrawan, 2021).

Pada tahun 2020-2023 IPG Sumatera Utara terus meningkat karena peningkatan jumlah penduduk yang berpartisipasi dalam bidang kesehatan, ekonomi dan sosial dan juga menurunnya kesenjangan antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) laki-laki dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perempuan.

Pembangunan berbasis gender telah tercantum secara eksplisit dalam tujuan ke-5 *Sustainable Development Goals* (SDGs), “Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan dan Anak”. Adanya tujuan kesetaraan gender sebagai salah satu tujuan SDGs menguatkan urgensi kesetaraan gender dalam pembangunan manusia. Dalam analisis capaian pembangunan manusia, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan dua jenis indikator yang sering digunakan. Meskipun IPM dapat menjabarkan analisis terhadap perolehan pembangunan di suatu wilayah, akan tetapi indikator ini belum mampu mencerminkan disparitas gender yang justru sedang menjadi isu global. Untuk memenuhi kebutuhan terakhir maka disusun Indeks Pembangunan Gender (IPG), yang pada dasarnya hampir sama dengan IPM tetapi dilakukan pemilahan jenis kelamin untuk masing-masing komponennya.

Menurut Hakiki & Yulmardi (2020) Pentingnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) terhadap kemiskinan karena TPAK ialah persentase rasio angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. TPAK berfungsi sebagai indikator taraf kesulitan angkatan kerja untuk mendapatkan pekerjaan. Nilai TPAK yang tinggi memperlihatkan besarnya kesempatan kerja yang tersedia, karena semakin tinggi TPAK maka akan mendorong bertumbuhnya ekonomi (*labour supply*) yang akan memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Selain itu, dengan peluang kerja yang besar maka akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga masyarakat mampu menaikkan taraf hidupnya dan mendapatkan pendidikan dan kesehatan yang lebih baik. Untuk meningkatkan potensi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dari segi pendapatan, taraf hidup, pendidikan dan

kesehatan mencerminkan tantangan yang masih dihadapi dalam mencapai kesetaraan gender secara menyeluruh sehingga memerlukan upaya untuk mengurangi kesenjangan gender yang tidak hanya berdampak positif terhadap perempuan namun juga pada masyarakat secara keseluruhan.

Pentingnya Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) terhadap Kemiskinan karena peningkatan pertumbuhan ekonomi untuk menurunkan kemiskinan harus mampu mendorong peningkatan kesetaraan gender. Pencapaian kesetaraan gender artinya menghilangkan kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan disegala bidang. Tingginya kesetaraan gender akan mendorong produktivitas, pertumbuhan ekonomi dan efisiensi pembangunan secara keseluruhan. Ketimpangan gender dapat menyebabkan pembangunan tidak dapat mencapai potensi maksimalnya. Ketimpangan gender dinilai dapat menghambat perekonomian. Ketimpangan gender terjadi pada pendidikan, lapangan pekerjaan, akses atas sumber daya, ekonomi, kekuasaan, dan partisipasi politik. Rendahnya kesetaraan gender dianggap membatasi produktivitas, pertumbuhan ekonomi dan efisiensi pembangunan (Hartono *et al.*, 2023).

Sementara itu menurut Setiani *et al.*, (2024) Indeks Pembangunan Gender (IPG) juga dianggap penting dalam menganalisa kemiskinan karena kemiskinan dapat menjadi dampak yang vital pada sebuah pembangunan manusia dikarenakan apabila masyarakat tidak mampu mencukupi kebutuhan sehari – hari maka kemampuan untuk memperoleh akses krusial seperti pendidikan dan kesehatan pun akan semakin sulit yang akhirnya kondisi ini juga akan berpengaruh pada capaian IPG di bidang indikator pendidikan dan kesehatan.

Adapun Dampak kemiskinan bagi Perekonomian akan dapat meningkatkan kegiatan-kegiatan ekonomi sehingga dapat menyerap tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja ini akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Peningkatan pendapatan masyarakat akan mampu mengangkat masyarakat keluar dari garis kemiskinan. Semakin tinggi tingkat pendidikan, maka pengetahuan dan keahliannya akan meningkat, sehingga akan mendorong produktivitas kerjanya. Pada akhirnya seseorang yang memiliki produktivitas yang tinggi akan memperoleh kesejahteraan yang lebih. Pengangguran akan menimbulkan berbagai masalah ekonomi dan sosial kepada yang mengalaminya. Kondisi menganggur menyebabkan seseorang tidak memiliki pendapatan, akibatnya kesejahteraan yang telah dicapai akan semakin merosot (Megasari *et al.*, 2015).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), Indeks Pembangunan Gender dan Kemiskinan. Pemahaman yang lebih dalam tentang hubungan ini dapat membantu pemerintah dan pemangku kepentingan dalam merancang kebijakan yang lebih efektif untuk menurunkan garis kemiskinan, meningkatkan partisipasi angkatan kerja dan kesetaraan gender di Sumatera Utara.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik menganalisis “**Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) terhadap Kemiskinan di Sumatera Utara**”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut :

1. Apakah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) berpengaruh terhadap Kemiskinan di Sumatera Utara?
2. Apakah Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) berpengaruh terhadap Kemiskinan di Sumatera Utara?
3. Apakah Indeks Pembangunan Gender (IPG) berpengaruh terhadap Kemiskinan di Sumatera Utara?
4. Apakah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), Indeks Pembangunan Gender (IPG) berpengaruh secara bersamaan (simultan) terhadap kemiskinan di Sumatera Utara?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini dibuat berdasarkan adanya perumusan masalah diatas, adapun tujuannya yaitu sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) terhadap Kemiskinan di Sumatera Utara
2. Mengetahui pengaruh Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) terhadap Kemiskinan di Sumatera Utara
3. Mengetahui pengaruh Indeks Pembangunan Gender (IPG) terhadap Kemiskinan di Sumatera Utara

4. Mengetahui pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) terhadap Kemiskinan di Sumatera Utara

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi atau masukan bagi pengembangan ilmu ekonomi dan juga menambah kajian mengenai ilmu ekonomi :

1. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan, wawasan, serta informasi yang lebih mendalam mengenai pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) terhadap kemiskinan.
2. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan mampu memberikan bahan perbandingan atau referensi dalam studi kedepannya yang terkait dengan riset ini dan juga menambah pengalaman dan wawasan mengenai adanya dampak Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) terhadap kemiskinan.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Sebagai bahan pembelajaran bagi peneliti dan referensi bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi Program Studi Ekonomi Pembangunan pada khususnya dan mahasiswa lain pada umumnya, yang berminat meneliti lebih lanjut

tentang Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) terhadap Kemiskinan di Sumatera Utara.

2. Sebagai referensi tambahan bagi pemerintah terkait, misalnya Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat dan seluruh pemerintahan daerah yang terkait yang ingin memperbaiki pertumbuhan ekonomi dan Kemiskinan di Indonesia.